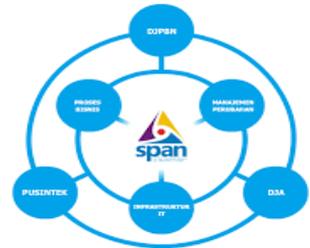




LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TA.2024 (AUDITED)



BALAI BESAR KIPM JAKARTA I



**GEDUNG KARANTINA PERTANIAN
BANDARA SOEKARNO - HATTA TANGERANG**
Telp/Fax : (021) 5507932 - 5506738
Email : jakarta1@bkipm.kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada **Balai Besar Karantina Ikan,**

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tangerang, 05 Mei 2025

Plt Kepala,



[Handwritten Signature]
Sri Anggoro, SP,MM
NIP. 19720725 199503 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan Atas-Pos-pos Neraca	33
D. Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional	52
E. Penjelasan atas Perubahan Laporan Perubahan Ekuitas	62
F. Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya	68

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan **Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I** yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan **Tahun Anggaran 2024** sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tangerang, 05 Mei 2025

Plt Kepala,



Sri Anggoro, SP,MM
NIP. 19720725 199503 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I **Tahun Anggaran 2024** ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada **Tahun Anggaran 2024** adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp. 3.674.858.460,00** atau mencapai **51 persen** dari estimasi pendapatan-LRA sebesar **Rp 7.152.875.000,00**

Realisasi Belanja Negara pada **Tahun Anggaran 2024** adalah sebesar **Rp. 8.086.354.888,00** atau mencapai **88 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 9.144.126.000,00**

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset Per **31 Desember 2024** dicatat dan disajikan sebesar **Rp. 2.944.434.589,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp. 169.259.555,00** Aset Tetap (neto) sebesar **Rp. 2.775.175.034,00** Piutang Jangka Panjang (neto) **Rp. 0,00** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp. 0,00**. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing- masing sebesar **Rp. 0,00** dan **Rp. 2.944.434.589,00**

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan / LO, beban, Surplus/Defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus atau defisit / LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan – LO untuk periode sampai dengan **31 Desember 2024** adalah sebesar **Rp. 3.663.665.000,00** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp. (8.707.099.089,00)** sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai **Rp. 5.043.434.089,00**. Surplus kegiatan non operasional dan Defisit pos - pos luar biasa masing – masing sebesar **Rp. 11.084.105,00** dan sebesar **Rp.0,00** sehingga entitas mengalami Defisit – LO sebesar **Rp 5.032.349.984,00**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pada Tanggal **01 Januari 2024** adalah sebesar **Rp. 19.329.587.157,00** dikurangi defisit – LO sebesar **Rp. (5.032.349.984,00)**. kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah ekuitas senilai **Rp. 53.091.795,00** dan ditambah transaksi antar entitas sebesar **Rp. (11.405.894.379,00)** sehingga ekuitas entitas pada Tanggal **31 Desember 2024** adalah senilai **Rp. 2.944.434.589,00**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan



Perubahan Ekuitas Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal **31 Desember 2024**, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI BESAR KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Anng	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	7.152.875.000	3.674.858.460	51	9.580.400.082
Jumlah Pendapatan		7.152.875.000	3.674.858.460	51	9.580.400.082
B. BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	4.053.015.000	4.038.324.212	100	10.126.277.750
Belanja Barang	B.4	4.126.217.000	3.307.447.876	80	7.158.727.669
Belanja Modal	B.5	964.894.000	740.582.800	77	3.730.925.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		9.144.126.000	8.086.354.888	98	21.015.930.419

II. NERACA

BALAI BESAR KIPM JAKARTA I N E R A C A PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	109.355
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	-	(547)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	169.259.555	306.106.781
Jumlah Aset Lancar		169.259.555	306.215.589
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	7.901.524.758,	28.743.751.457,
Gedung dan Bangunan	C.16	2.643.228.500,	14.859.733.594,
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	271.891.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	10.000.000	119.031.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(7.779.578.224)	(24.917.944.235)
Jumlah Aset Tetap		2.775.175.034	19.076.462.816
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		2.944.434.589	19.382.678.405
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	53.091.248
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	53.091.248
JUMLAH KEWAJIBAN		-	53.091.248
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	2.944.434.589	19.329.587.157
JUMLAH EKUITAS		2.944.434.589	19.329.587.157
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.944.434.589	19.382.678.405

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR KIPM JAKARTA I LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3.663.665.000	9.555.520.000
JUMLAH PENDAPATAN		3.663.665.000	9.555.520.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	4.038.324.212	10.126.168.395
Beban Persediaan	D.3	554.738.747	1.257.737.474
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.297.335.680	3.999.374.078
Beban Pemeliharaan	D.5	352.056.923	1.238.467.549
Beban Perjalanan Dinas	D.6	485.254.232	1.331.765.555
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	979.389.295	2.074.626.445
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		547
JUMLAH BEBAN		8.707.099.089	20.028.140.043
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.043.434.089)	(10.472.620.043)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional	D.11		
Surplus / Defisit pelepasan Aset		8.768.805	14.637.014
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional		(2.315.300)	
Surplus / Defisit dari kegiatan Non Operasional		2.315.300	
Pendapatan Pelepasan Aset		(8.768.805)	
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		11.084.105	14.637.014
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5.032.349.984)	(10.457.983.029)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNPB	D.12	-	-

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BALAI BESAR KIPM JAKARTA I
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	19.329.587.157	18.061.740.884
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5.032.349.984)	(10.457.983.029)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	53.091.795	51.215
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN			
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1		
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5		
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	53.091.795	51.215
JUMLAH		53.091.795	51.215
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(11.405.894.379)	11.725.778.087
EKUITAS AKHIR	E.5	2.944.434.589	19.329.587.157

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta

Dasar Hukum entitas dan rencana strategis **Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Balai Besar KIPM Jakarta I)** didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Entitas berkedudukan di Gedung Karantina Pertanian, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang - Banten.

Balai Besar KIPM Jakarta I mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan

berbahaya di lakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I berkomitmen dengan :

VISI:

Terwujudnya masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk
“ Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong.”

MISI :

Misi Kemeterian Keluatan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai Visi Misi Presiden dan wakil Presiden, Yaiutu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Konytribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

TUJUAN :

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni :
 - a. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat
 - b. Inovasi dan Riset KP menguat
2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni :
 - a. Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal
 - b. Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat.
 - c. Pengawasan Pengelolaan SDKP
 - d. Sistem Perkarantinaan Ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat.
 - e. Pengelolaan ruang laut optimal
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, Yakni Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh **Balai Besar KIPM Jakarta I**. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar KIPM Jakarta I menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan

dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan **Balai Besar KIPM Jakarta I** dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing

ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor **Balai Besar KIPM Jakarta I**. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor **Balai Besar KIPM Jakarta I** adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta

c) jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan
Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, **Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I** sudah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan Untuk membuka blokir yang dilakukan oleh DJA

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa Karantina	7.152.875.000	7.152.875.000
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, kalibr dan Standrisasi	0	
Jumlah Pendapatan	7.152.875.000	7.152.875.000
Belanja		
Belanja Pegawai	4.611.999.000	4.053.015.000
Belanja Barang	3.625.878.000	4.126.217.000
Belanja Modal		964.894.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	8.237.877.000	9.144.126.000

Pagu Anggaran/DIPA TA.2024 Balai Besar KIPM Jakarta I sebesar Rp. 9.144.126.000

B.1 Pendapatan

*Realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah Rp
3.674.858.460*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.674.858.460 atau mencapai 51 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 7.152.875.000. Pendapatan Kantor *Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I* terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	8.768.805	
Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	6.194.655.000	3.653.665.000	58,98
Pendapatan jasa karantina	958.220.000	10.000.000	1,04
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		2.424.655	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu			
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-		
Jumlah	7.152.875.000	3.674.858.460	51,38

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2024 mengalami Penurunan sebesar 61,64 persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan adanya pengalihan dan pemisahan PNBK ke Badan Karantina Ikan, dimana sisa Pendapatan Jasa karantina sebesar Rp 10.000.000,00

Perbandingan Realisasi Pendapatan 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	3.672.433.805	9.555.520.000	-61,57
Pendapatan Lain-lain	2.424.655	24.880.082	-90,25
Jumlah	3.674.858.460	9.580.400.082	-61,64

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp Realisasi Belanja instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp 8.086.354.888,00 atau 88,43% dari anggaran belanja sebesar Rp 9.144.126.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4.053.015.000,	4.038.324.212,	99,64
Belanja Barang	4.126.217.000,	3.307.447.876	80,16
Belanja Modal	964.894.000,	740.582.800	76,75
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Total Belanja Kotor	9.144.126.000	8.086.354.888	88,43
Pengembalian			-

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami Penurunan sebesar 61,52% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya perpindahan/mutasi Alih tugas pegawai dari BBKIPM Jakarta I ke Badan Karantina Indonesia, sehingga mempengaruhi, belanja Pegawai, Barang dan Modal.

Perbandingan Realialisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.038.324.212	10.126.277.750	(60,12)
Belanja Barang	3.307.447.876,	7.158.727.669	(53,80)
Belanja Modal	740.582.800	3.730.925.000	(80,15)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	8.086.354.888	21.015.930.419	(61,52)

Belanja
Pegawai Rp
4.038.324.212,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 4.038.324.212,00 dan Rp 10.126.277.750,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2024 mengalami Penurunan sebesar 60,12 Persen dari TA 2023 Hal ini disebabkan Berkurangnya Pegawai akibat dari birokrasi

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS	2.117.396.071	4.936.295.481	100,00
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	37.978.000	426.464.000	100,00
Belanja Tunkin	1.882.950.141	4.763.518.269	-
Jumlah Belanja Kotor	4.038.324.212	10.126.277.750	(60,12)
Pengembalian Belanja Pegawai			#DIV/0!
Jumlah Belanja Bersih	4.038.324.212	10.126.277.750	(60,12)

B.4 Belanja Barang

Belanja
Barang Rp
3.307.447.876,00

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 3.307.447.876,00 dan Rp 7.158.727.669,00 Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami Penurunan Sebesar 53,80% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya Perubahan Birokrasi yang menyebabkan berkurangnya jumlah pegawai yang secara otomatis akan mengurangi kebutuhan belanja barang, seperti belanja perjalanan Dinas, Biaya pemeliharaan, jasa, persediaan dll

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.296.493.410	1.981.992.373	(34,59)
Belanja Barang Non Operasional	87.774.350	219.195.320	(59,96)
Belanja Barang Persediaan	192.341.088	827.001.519	(76,74)
Belanja Jasa	913.067.920	1.580.295.173	(42,22)
Belanja Pemeliharaan	332.516.876	1.218.477.729	(72,71)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	485.254.232	1.331.765.555	(63,56)
Jumlah Belanja Kotor	3.307.447.876	7.158.727.669	(53,80)
Pengembalian Belanja			
Jumlah Belanja	3.307.447.876	7.158.727.669	(53,80)

Belanja Modal **B.5 Belanja Modal**

Rp
740.582,800,00

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 740.582,800,00 dan Rp 3.730.925.000,00 .Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami Penurunan sebesar 80,15 % dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh adanya Pengalihan asset ke Badan Karantina Indonesia.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2023	REALISASI PER 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.765.300	3.730.925.000	(95,45)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	570.817.500		#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah, tenaga kerja			
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	740.582.800	3.730.925.000	-80,15
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	740.582.800	3.730.925.000	-80,15

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi tersebut pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan karena berkurangnya belanja modal tanah pada periode pelaporan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 2020	REALISASI 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp
169.765.300*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp 169.765.300,00 mengalami Kenaikan sebesar 95,45 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp 3.730.925.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya reorganisasi yang menyatakan bahwa BBKIPM Jakarta 1 akan di hapus dan berstatus menjadi satuan Pelayanan. Sehingga tidak terlalu banyak membutuhkan Peralatan dan mesin..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Periode TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 2024	REALISASI 2023	Naik (Turun) %
Peralatan dan Mesin	169.765.300	3.730.925.000	-95,45
Honor Pengelola			
Jumlah Belanja Kotor	169.765.300	3.730.925.000	-95,45
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja Bersih	169.765.300	3.730.925.000	-95,45

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp570.817.500*

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 570.817.500,00 dan Rp 0,00 . Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami Kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi TA 2023, karena tersedianya Pagu anggaran pada Belanja Modal untuk Gedung dan Bangunan dimana Gedung dan Bangunan banyak yang sudah dialihkan untuk Badan karantina ikan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

Periode TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	570.817.500	0	100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	570.817.500	0	100,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	570.817.500	0	100,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 0

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami penurunan/ kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan tidak adanya alokasi dana anggaran

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Periode

TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (Turun) %
Belanja Modal Jaringan, Pemasangan Tambah Daya Listrik	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Irigasi	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal lainnya Rp. 0

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Periode Laporan TA 2023 ini.

Belanja
Bantuan Sosial
Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak ada Realisasi Belanja bantuan Sosial pada Pelaporan Periode TA 2024 ini.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Periode
TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Uang Tunai	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TH 2020	TH 2019
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Jumlah	-	-

Saldo pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan (423215) yang berada di Kas Bendahara Penerimaan per TA 2023 sebesar Rp. 0,00

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	2020	2019
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

C.4 Piutang PNBP

Piutang Bukan Pajak Rp.0,00

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 109,355,00 Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	TA 2024	TA 2023
Piutang PNB	-	109.355
Piutang Lainnya		
Jumlah	-	109.355

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi periode TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp0.00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Nama	Tahun 2022	Tahun 2021
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		0	0
Jumlah		-	-

Bagian Lancar
TPA
Rp.0,00

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) periode TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0.00 dan Rp. 0,00. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas)

bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TA 2020	TA 2019
1			-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih – Piutang

Jangka Pendek

Rp 0,00

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek periode TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 547

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	109.355	0,50%	547
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,50%	547
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	547

Belanja Dibayar di Muka Rp0 **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka periode TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TA 2024	TA 2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Mesin Photocopy	-	-
Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional	-	-
Jumlah	-	-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima periode 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus

Diterima periode TA 2024 dan 2023

Jenis	TH 2020	TH 2019
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp
169.259.555,00

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 169.259.555,00 dan Rp 306.106.781,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31-Dec-24	31-Dec-23
Barang Konsumsi	132.316.058	162.467.615
Barang untuk Pemeliharaan	28.098.997	21.759.000
Suku Cadang		3.103.050
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Bahan Baku	8.844.500	118.777.116
Persediaan lainnya	-	-
Jumlah	169.259.555	306.106.781

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) periode TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp45.914.000 Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Adapun TGR ini terjadi akibat kesalahan penggunaan pada akun Penambah daya tahan tubuh dan kurang setor pada pendapatan Jasa karantina

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) periode TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TA 2023	TA 2022
1	Pegawai BBKIPM Jakarta 1	-	-
2	Pendapatan Jasa Karantina	-	-
3		0	0
Jumlah		-	-

TPA
Rp0.00

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) periode TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Tagihan

Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TA 2023	22
1			
2			
3			
4			
5		-	
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0,00*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang periode TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Tanah
Rp0

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor BALAI BESAR KIPM JAKARTA I periode Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Terdapat Realisasi pada periode TA 2024, Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2020	0

Rincian saldo Tanah periode TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1			-
2			-
3			-
4			-
Jumlah			-

Peralatan dan
Mesin Rp
7.901.524.758,00

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin periode TA 2024 dan 2023 adalah Rp 7.901.524.758,00 dan Rp 28.743.751.457,00 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2024	28.743.751.457
Mutasi tambah:	
Pembelian	169.765.300
	61.860.108
Reklasifikasi dari Aset tetap ke Aset Lainnya	
Transfer Masuk	
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	21.073.852.107
Penghentian dari penggunaan	
Saldo per 31 Desember 2024	7.901.524.758
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	7.361.166.300
Nilai Buku per 31 Desember 2024	15.262.691.058

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa pembelian senilai Rp. 169.765.300 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Satuan	Nilai R
1	Printer	5 Buah	12.543.000
2	PC Unit	4 Buah	46.620.000
3	Meja Pelayanan	1 Unit	25.000.000
4	Meja pegawai	4 Unit	23.976.000
5	Meubelair	11 Unit	28.039.500
6	AC Split	3 Unit	26.273.700
7	Dispenser	2 Unit	7.313.100
JUMLAH			169.765.300

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin yang berupa Transfer Masuk senilai Rp 245.090.480

Transfer Masuk

NO	Jenis	Entitas Asal	Nilai (Rp)
1	Sertifikat HC	Stasiun KIPM Batam	1.753.500
2	Sertifikat HC	Sekretariat Badan	240.761.000
3	Sertifikat HC	Stasiun KIPM Bandung	345.800
4	Sertifikat HC	Stasiun KIPM Kupang	82.500
5	Sertifikat HC	Stasiun KIPM Aceh	891.000
6	Sertifikat HC	Stasiun KIPM Merak	85.800
7	Sertifikat HC	Stasiun KIPM Cirebon	532.250
8	Sertifikat HC	Stasiun KIPM Bima	638.630
9	Meubelair	Biro Umum	61.860.108
10	Akumulasi Meubelair	Biro Umum	(61.860.108)
Total			245.090.480

*Gedung dan
Bangunan*
Rp 2.643.228.500,00

C.16. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan periode TA 2024 dan 2023 adalah Rp 2.643.228.500,00 dan Rp 14,859,733,594 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	14.859.733.594
Mutasi tambah:	
Pengembangan melalui KDP	569.794.500
Bangunan Gudang Tutup Permanen	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	-
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	-
Mutasi kurang:	-
	(12.786.299.594,)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-
Saldo per 31 Desember 2023	2.643.228.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	418.411.924
Nilai Buku per 31 Desember 2023	14,859,733,594

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp
0,00*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 271,891,000 Pada periode TA 2024 tidak ada Transaksi penambahan Jalan,Irigasi dan Jaringan, Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	271.891.000
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan listrik Lab	-
Mutasi kurang:	(271.891.000)
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

*Aset Tetap
Lainnya
Rp 10.000.000,00*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya periode TA 2024 dan 2023 adalah Rp10.000.000,00 dan Rp119.031.000 Aset tetap tersebut berupa Bahan Perpustakaan yang terekan dalam bentuk mikro. Terdapat mutase kurang atas aset tetap ini untuk periode TA 2024. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	119.031.000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	109.031.000
Saldo per 31 Desember 2024	10.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	
Nilai Buku per 31 Desember 2024	10.000.000

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp 0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan periode TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 .

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp
(7.779.578.224)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintah periode TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing Rp (7.779.578.224) dan Rp 24.917.944.235 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	2023			2023		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	7.901.524.758	-7.361.166.300	15.262.691.058	28.743.751.457	22.335.257.226	6.408.494.231
2	Gedung dan Bangunan	2.643.228.500	-418.411.924	3.061.640.424	14.859.733.594	2.520.780.910	12.338.952.684
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan			0	271.891.000	61.906.099	209.984.901
4	Aset Tetap Lainnya	1.000.000		1.000.000	119.031.000		119.031.000
	Akumulasi Penyusutan	10.545.753.258	-7.779.578.224	18.325.331.482	43.994.407.051	24.917.944.235	19.076.462.816

*Aset Tak
Berwujud
Rp 0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) periode TA 2024 dan 2023 adalah Rp 0 dan Rp 0, Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. BALAI BESAR KIPM JAKARTA I saat ini tidak mempunyai Aset Tak Berwujud pada Kantor Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Rincian Aset Tak Berwujud periode TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software	0
	0
Jumlah	0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain periode 2024 dan 2023 adalah Rp 0 dan Rp 0 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

*Aset Lain-
Lain Rp. 0*

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	-
Mutasi tambah:	
Penghentian BMN	
Mutasi kurang:	-
penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp 0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya periode TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya periode 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0		0
Aset Lain-lain	0		0
Jumlah	0	0	0

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 0,00

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga periode TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 53,091,248. BBKIPM Jakarta I sudah tidak punya Utang kepada Pihak Ketiga karena sudah dialihkan ke Badan Karantina Ikan

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar		
2			
3			
4			
Jumlah		-	-

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Ditangguhkan periode TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN atas Potongan tulin pada keterlambatan dan ijin sakit pada periode TA 2024. Pendapatan yang Ditangguhkan pada Kantor Balai Besar KIPM Jakarta I per tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut:

Pendapatan
yang
ditangguhkan
Rp 0,00

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

Uraian	Jumlah
Hukuman Disiplin Pegawai	0
PPH yang belum disetor	-
	-

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0.00*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka periode TA 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan diterima di muka

Uraian	Jumlah
Total	-

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar periode TA 2024 dan 2023 sebesar Rp 0,00 dan Rp 53.091.248,00 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

Tahun Anggaran 2024 dan TA 2023

No	Uraian	2024	2023
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus dibayar	-	-
2	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar	-	53.091.248
3	Belanja Modal yang Masih Harus dibayar	-	-
4	Utang terhadap Pendapatan Jasa Karantina		
Jumlah		-	53.091.248

Ekuitas Rp

2.944.434.589

C. Ekuitas

Ekuitas periode Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp **2.944.434.589** dan Rp**19.329.587.157** Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan

PNBP

Rp

3.663.665.000,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada periode TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 3.663.665.000,00 dan Rp 9,555,520,000 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak periode TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	3.663.665.000	9.555.520.000	-160,82
Pendapatan Lain-lain			
Jumlah	3.663.665.000	9.555.520.000	-160,82

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan/Jasa Sensor Sertifikasi Mutu dan Karantina Ikan yang berasal dari transaksi tahun 2024.

Beban

Pegawai Rp

4.038.324.212,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada periode TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 4.038.324.212,00 dan Rp 10,126,168,395 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai periode TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	2.117.396.071	4.936.295.481	#####
Beban Tunjangan-Tunjangan	0	0	0,00
Beban Lembur	37.978.000,	426.464.000,	#####
Beban Tukin	1.882.950.141,	4.763.408.914,	#####
Jumlah	4.038.324.212	10.126.168.395	#####

Beban

*Persediaan Rp
554.738.747,00*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada periode 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 554.738.747,00 dan Rp 1,257.737.474,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan periode TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	424.866.637,	527.845.011,	-24,24
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges			
Beban Bahan Baku	129.872.110,	729.892.463,	-462,01
Beban Persediaan lainnya			
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	
Jumlah Beban Persediaan	554.738.747	1.257.737.474	-126,73

Beban Jasa
Rp3,999,374,078

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2.297.335.680,00 dan Rp 3,999,374,078,00 Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Bar Xang dan Jasa untuk periode 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa posisi periode TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.143.011.894,	1.428.406.937,	-19,98
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh		160.113.000,	-100,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	619.500,	3.030.000,	-79,55
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	89.424.000,	170.544.000,	-47,57
Beban Barang Operasional Lainnya	63.438.016,	219.898.436,	-71,15
Beban Bahan	72.167.500,	180.717.000,	-60,07
Beban Honor Output Kegiatan		8.160.000,	-100,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	15.606.850,	30.318.320,	-48,52
Beban Langganan Listrik	30.104.500,	982.303.033,	-96,94
Beban Langganan Telepon	26.085.199,	44.130.727,	-40,89
Beban Langganan Air		77.919.404,	-100,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	83.100.000,	5.400.000,	1438,89
Beban Sewa	300.000.000,	293.463.636,	2,23
Beban Jasa Profesi		28.700.000,	-100,00
Beban Jasa Lainnya	473.778.221,	366.269.585,	29,35
Beban Jasa-Penanganan Pandemi Covid 19			#DIV/0!
Jumlah	2.297.335.680	3.999.374.078	-42,56

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp. 352.056.923,00

Beban Pemeliharaan periode TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 352.056.923,00 dan Rp. 1,236,467.549,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Periode TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		541.563.178,	-100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-penanganan Covid	0	0	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	328.006.876,	662.917.051,	-50,52
Beban persediaan untuk pemeliharaan	20.946.997,	21.866.500,	-4,21
Beban persediaan suku cadang	3.103.050,	12.120.820,	-74,40
Beban Pemeliharaan jaringan			
Jumlah	352.056.923	1.238.467.549	-71,57

Beban Perjalanan Dinas Rp. 485.254.232,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 485.254.232,00 dan Rp1,331,765,555,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas periode TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	398.704.232,	998.847.426,	-60,08
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	86.550.000,	181.500.000,	-52,31
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		20.446.500,	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		130.971.629,	-100,00
Jumlah	485.254.232	1.331.765.555	-63,56

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0.00*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat periode TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
periode 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Jumlah	0	-	-

**Beban
Bantuan Sosial
Rp0.00**

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial periode TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Periode TA 2023 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial periode TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2003	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	-	-
Jumlah	0	-	-

**Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp 979.389.295,00**

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 979.389.295,00 dan Rp 2.074.626.445. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan

Amortisasi untuk periode TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi periode TA 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	772.461.091,	1.660.770.035,	-53,49
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	203.305.619,	406.611.241,	-50,00
Beban Penyusutan Irigasi	812.500,	1.625.000,	-50,00
Beban Penyusutan Jaringan	2.810.085,	5.620.169,	-50,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			#DIV/0!
Jumlah Penyusutan	979.389.295	2.074.626.445	-52,79
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud			-
Beban Penyusutan aset lain-lain			-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	979.389.295	2.074.626.445	29,32

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp
0,00*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 547,00 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

periode 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	0	547	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	0	0	-
Jumlah	0	547	-

Beban Lain-lain Rp0.00

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain periode 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	-	-
Jumlah	0	-	-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Surplus /Defisit
dari Kegiatan
Non
Operasional
Rp
11.084.105,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional periode 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional periode 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Surplus/Depisit dari kegiatan Non operasional lainnya	2.315.300	14.637.014	-84,18
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	8.768.805		
pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya			
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Kantor	0	0	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Defisit Selisih Kurs	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	11.084.105	14.637.014	-24,27

Pos Luar
Biasa
Rp0,00

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa periode 2024 dan 2023

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
Jumlah	0	-	-

E . PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E.1 Ekuitas Awal

Rp

19.329.587.157,00

Nilai ekuitas pada tanggal periode 01 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 19.329.587.157,00 dan Rp18,061,740,884

Defisit LO

E.2 Surplus (Defisit) LO

Rp (5.032.349.984)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada periode TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp (5.032.349.984) dan Rp(10.457.983.029).Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Aset Rp,0.

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Persediaan

Rp.0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Bahan Untuk Pemeliharaan	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-
Bahan Baku	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp, 0

E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp 0

E.6 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 8.500.000. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

*Koreksi Lain-
Lain
Rp53.091.795*

E.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 53.091.795 dan Rp 51.215. Koreksi ini merupakan koreksi Lain terkait dengan Beban yang masih harus dibayar yang berupa Air dan Listrik, sebesar RP 53.091.248 yang akan dialihkan ke Badan Karantina Indonesia serta adanya penyisihan Piutang belanja pegawai berupa Tunjangan Kinerja sebesar Rp 547. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	53.091.248
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	547
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	53.091.795

E.7 Transaksi Atas Entitas

*Transaksi Atas
Entitas Rp
(11.405.894.379)*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp – (11.405.894.379,00) dan Rp 11.725.778.087. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.086.354.888,
Diterima ke Entitas Lain	-3.674.858.460,
Transfer Keluar	(16.062.481.287)
Transfer Masuk	245.090.480,
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(11.405.894.379)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.7.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp(3.674.858.460) sedangkan DKEL sebesar Rp 8.086.354.888,00

E.7.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 245.090.480 terdiri dari:

Transfer Masuk

NO	Jenis	Entitas Asal	Nilai (Rp)
1	Sertifikat HC	Stasiun KIPM Batam	1.753.500
2	Sertifikat HC	Sekretariat Badan	240.761.000
3	Sertifikat HC	Stasiun KIPM Bandung	345.800
4	Sertifikat HC	Stasiun KIPM Kupang	82.500
5	Sertifikat HC	Stasiun KIPM Aceh	891.000
6	Sertifikat HC	Stasiun KIPM Merak	85.800
7	Sertifikat HC	Stasiun KIPM Cirebon	532.250
8	Sertifikat HC	Stasiun KIPM Bima	638.630
9	Meubelair	Biro Umum	61.860.108
10	Akumulasi Meubelair	Biro Umum	(61.860.108)
Total			245.090.480

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 16.062.481.287

No	Jenis	Entitas Akhir	Nilai
1	Kendaraan Dinas roda 4 sebanyak 3 Unit	Sekretarian Badan	1.133.674.000
2	Akumulasi Kendaraan roda 4	Sekretarian Badan	(1.133.674.000)
3	Sarana dan Prasarana Pelayanan	Cirebon	198.968.000
4	Penghapusan	Badan karantina ikan	15.863.513.287
Jumlah			16.062.481.287

E.7.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0-, dari total Rp0-, yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2017 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir

Rp. 2.944.434.589,00

E.8 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada periode TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.944.434.589,00 dan Rp. 19.329.587.157

F . PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca pada Balai Besar KIPM Jakarta I.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN



Laporan Keuangan Tahunan
Balai Besar KIPM Jakarta I **2024**

Pagu Anggaran Prioritas Nasional (PN) adalah sebesar Rp. 1.218.894.000 dan realisasi Rp.986.551.700 (80,94%) dengan rincian sbb :

Prioritas Nasional

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Capaian Output		
									RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)
4	3989	PDC001	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	60.000.000	59.890.000	99,82	246	produk	246	246	100
7	3989	QIA001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	80.000.000	76.116.000	95,15	4	Produk	4	4	100
8	3989	QIC001	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	14.000.000	11.011.000	78,65	22	Lembaga	22	22	100
9	3989	QIC002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	100.000.000	98.951.900	98,95	65	Lembaga	65	65	100
10	3989	RAL001	Sarana Pengujian Mutu	364.894.000	169.765.300	46,52	1	Unit	1	1	100
11	3989	RBQ001	Prasarana Pengujian Mutu	600.000.000	570.817.500	95,14	1	Unit	1	1	100
				1.218.894.000	986.551.700						



Laporan Keuangan Tahunan Balai Besar KIPM KIPM Jakarta I 2024

DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO
periode : DESEMBER satker : 427520

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Target	Satuan	Keluaran (Data Sakti)						GAP**	PN
				Pagu	Realisasi*	%			Bulan Ini			S.d Bulan Ini				
									RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)		
1	3989	ABR009	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	10.000.000	9.405.000	94,05	1	RekomendasiKe bijakan	1	-99	79	1	1	100	5,95	Non PN
2	3989	ADF001	Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	20.000.000	7.598.000	37,99	2	Lembaga	0	-78	18	2	2	100	62,01	Non PN
3	3989	BIA001	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	22.000.000	3.460.000	15,73	1	Produk	1	-73	84	1	1	100	84,27	Non PN
4	3989	PDC001	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	60.000.000	59.890.000	99,82	246	produk	4	167	3	246	246	100	0,18	PN
5	3989	PDC002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	25.000.000	22.766.000	91,06	164	produk	164	119	87	164	164	100	8,94	Non PN
6	3989	PDF002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	236.000.000	16.930.000	7,17	39	Lembaga	39	-21	95	39	39	100	92,83	Non PN
7	3989	QIA001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	80.000.000	76.116.000	95,15	4	Produk	0	-71	26	4	4	100	4,85	PN
8	3989	QIC001	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	14.000.000	11.011.000	78,65	22	Lembaga	1	-52	21	22	22	100	21,35	PN
9	3989	QIC002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	100.000.000	98.951.900	98,95	65	Lembaga	6	-17	2	65	65	100	1,05	PN
10	3989	RAL001	Sarana Pengujian Mutu	364.894.000	169.765.300	46,52	1	Unit	1	-79	95	1	1	100	53,48	PN
11	3989	RBQ001	Prasarana Pengujian Mutu	600.000.000	570.817.500	95,14	1	Unit	1	-89	95	1	1	100	4,86	PN
12	7010	DCC001	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	35.294.000	19.213.364	54,44	1	Kegiatan	1	-99	51	1	1	100	45,56	Non PN
13	7010	PBR001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	75.000.000	1.600.000	2,13	1	RekomendasiKe bijakan	1	-99	98	1	1	100	97,87	Non PN
14	7010	PDD001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	7.000.000	-	0	1	Lembaga	1	1	96	1	1	100	100	Non PN



*Laporan Keuangan Tahunan
Balai Besar KIPM KIPM Jakarta I* **2024**

15	7010	PDD002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	17.000.000	292.400	1,72	1	Lembaga	1	-99	98	1	1	100	98,28	Non PN
16	7010	QIA001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	37.000.000	6.674.696	18,04	2	Produk	2	2	81	2	2	100	81,96	Non PN
17	3987	EBA956	Layanan BMN	22.750.000	21.903.750	96,28	1	Layanan	1	-79	3	1	1	100	3,72	Non PN
18	3987	EBA958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	78.771.000	77.786.600	98,75	1	Layanan	0	-59	0	1	1	100	1,25	Non PN
19	3987	EBA960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	13.509.000	9.615.000	71,17	1	Layanan	1	-79	33,36	1	1	100	28,83	Non PN
20	3987	EBA962	Layanan Umum	801.918.000	730.705.118	91,12	1	Layanan	1	-69	19,36	1	1	100	8,88	Non PN
21	3987	EBA963	Layanan Data dan Informasi	33.580.000	23.828.814	70,96	1	Layanan	1	-59	31,36	1	1	100	29,04	Non PN
22	3987	EBA994	Layanan Perkantoran	6.299.270.000	5.967.987.873	94,74	1	Layanan	1	-90,63	15,36	1	1	100	5,26	Non PN
23	3987	EBC954	Layanan Manajemen SDM	60.021.000	54.677.329	91,1	72	Orang	55	12	13	72	72	100	8,9	Non PN
24	3987	EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	74.530.000	70.318.278	94,35	1	Dokumen	1	-79	5	1	1	100	5,65	Non PN
25	3987	EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	43.610.000	42.327.801	97,06	1	Dokumen	1	-59	9	1	1	100	2,94	Non PN
26	3987	EBD974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	12.979.000	12.722.500	98,02	1	Dokumen	1	-79	2	1	1	100	1,98	Non PN



Laporan Keuangan Tahunan
Balai Besar KIPM KIPM Jakarta I **2024**
